

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu. Menurut Eyestone dalam Nur (2019:7) Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Demikian pula menurut Anderson dalam Nur (2019:7), kebijakan dapat dipahami sebagai suatu pedoman tindakan yang sengaja dirancang oleh individu maupun kelompok untuk merespons atau menyelesaikan suatu isu atau permasalahan tertentu.

Kebijakan atau Peraturan mengenai perjalanan dinas memiliki peranan penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah. Di Kabupaten Aceh Utara, Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas dibuat untuk memberikan pedoman yang jelas dan mengatur tata cara perjalanan dinas yang dilakukan oleh seluruh pegawai. Perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi aparatur negara. Sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan, perjalanan dinas diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lebih tinggi.

Perjalanan dinas berperan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, koordinasi antar instansi, serta untuk memantau langsung pelaksanaan kebijakan atau kegiatan yang sedang berjalan di lapangan.

Pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, memiliki peraturan khusus untuk mengatur pelaksanaan perjalanan dinas bagi seluruh pegawai dan aparatur pemerintahan guna memastikan kelancaran administrasi dan pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas.

Perjalanan dinas bukan hanya sebatas kegiatan rutin, melainkan bagian integral dari proses pengelolaan pemerintahan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, perjalanan dinas berpotensi menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang jelas dan sistematis, agar perjalanan dinas yang dilakukan tetap terarah pada pencapaian tujuan yang lebih besar dan mendukung jalannya pemerintahan secara keseluruhan.

Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada setiap pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kesalahan administratif yang merugikan. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Aceh Utara memberikan pedoman yang jelas untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, baik dari sisi prosedur permohonan perjalanan dinas, pengaturan biaya, maupun kewajiban melaporkan hasil perjalanan dinas.

Peraturan ini juga mengatur berbagai jenis perjalanan dinas, baik yang bersifat lokal maupun luar daerah, serta durasi, biaya, dan bentuk pertanggungjawaban setelah perjalanan selesai dilakukan. Hal ini penting untuk

mencegah penyalahgunaan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan perjalanan dinas dapat berjalan dengan efisien, menghindari penyalahgunaan, serta meningkatkan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.

Implementasi peraturan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik, agar perjalanan dinas dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sekaligus menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Peraturan Bupati ini mengatur berbagai aspek perjalanan dinas, mulai dari prosedur permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi. Meskipun Peraturan Bupati Aceh Utara tentang perjalanan dinas sudah diatur dengan rinci, namun pelaksanaan peraturan ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

Dugaan awal, terdapat fenomena masalah di kalangan pegawai yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan pegawai terkait ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan, serta variasi dalam penafsiran peraturan di tiap-tiap unit kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keseragaman dalam penerapan peraturan tersebut. Beberapa pihak merasa kurang mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai isi peraturan ini, sehingga mengakibatkan praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Permasalahan lainnya sebagai contoh dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang melibatkan banyak pihak, terdapat kecenderungan prosedur administratif

yang memakan waktu, karena dokumen perjalanan dinas harus melewati beberapa tahap pengesahan dan verifikasi. Hal ini menambah waktu yang dibutuhkan untuk memproses perjalanan dinas, yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Proses ini juga menambah beban bagi pegawai yang terlibat, yang dapat mengurangi fokus mereka pada tugas utama yang lebih mendesak.

Beberapa pemahaman penting yang perlu diperhatikan oleh pegawai mengenai tata cara alur perjalanan dinas adalah bahwa syarat awal untuk melakukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan bupati ini seperti permohonan awal, mekanisme persetujuan perjalanan dinas. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peraturan ini agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dinamis. Peninjauan terhadap implementasi peraturan perjalanan dinas ini penting dilakukan secara berkala. Evaluasi akan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif peraturan tersebut dilaksanakan dan apa saja faktor penghambat yang mengurangi efektivitasnya. Selain itu, evaluasi juga memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan terhadap sistem administrasi perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas dapat berjalan lebih efisien dan lebih akuntabel.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek pemahaman terhadap peraturan yang ada, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Perjalanan dinas yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan pemborosan, kesalahan administrasi, dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap

pelaksanaan perjalanan dinas ini akan memberikan kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih transparan.

Implementasi Peraturan Bupati ini memerlukan peninjauan yang mendalam untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan merumuskan strategi perbaikan. Peraturan yang baik tentu akan memberikan pedoman yang jelas bagi pengelolaan perjalanan dinas. Namun, tanpa penerapan yang baik di lapangan, tujuan yang diharapkan dari peraturan tersebut tidak akan tercapai. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji persoalan tersebut, tidak hanya dalam konteks Kabupaten Aceh Utara, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memperoleh gambaran lebih jauh terkait Perjalanan Dinas yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam Implementasi Perup perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati mengenai perjalanan dinas dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Perbup perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
2. Menemukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam Implementasi Perbup perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam beberapa aspek berikut:

- a. Teoritis, Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik, khususnya terkait perjalanan dinas di tingkat pemerintah daerah.

- b. Praktis, Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperbaiki tata kelola perjalanan dinas.
- c. Kebijakan, Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di daerah lain yang ingin meningkatkan efektivitas perjalanan dinas melalui pembelajaran dari studi kasus Kabupaten Aceh Utara.
- d. Akademik, Memberikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian seputar perjalanan dinas dan implementasi kebijakan serupa.